



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA CAKERU KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Pauzan Hafizi¹, M. Husaini², Jumaidi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: pauzanhafizi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang bahwa pada pengelolaan sampah di Desa Cakeru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara permasalahan mengenai kurangnya informasi kepada masyarakat Desa Cakeru mengenai pentingnya pengelolaan sampah, petugas kebersihan sampah tidak rutin mengangkut dan membersihkan sampah, sarana tempat sampah hanya tersedia satu jenis tong sampah harusnya disediakan tong sampah terpilah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan daerah nomor 16 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Desa Cakeru kecamatan Amuntai Utara, faktor penghambat dan upaya apa yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sehingga terdapat informan berjumlah 13 orang dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Pengelolaan Sampah di Desa Cakeru kurang baik. Yakni: *Pertama*, variabel komunikasi diketahui pada Desa Cakeru indikator transmisi kurang baik, indikator kejelasan kurang baik dan indikator konsistensi kurang baik. *Kedua*, variabel sumber daya diketahui pada Desa Cakeru indikator sdm/staff kurang baik, indikator informasi kurang baik, indikator wewenang kurang baik dan indikator fasilitas kurang baik. *Ketiga*, variabel disposisi diketahui pada Desa Cakeru indikator sikap para pelaksana kurang baik dan indikator insentif kurang baik. *Keempat*, variabel struktur birokrasi diketahui pada Desa Cakeru indikator SOP (standar operating procedures) kurang baik dan indikator fragmentasi kurang baik. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan kurangnya sosialisasi oleh pihak desa kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan membuat peraturan larangan membuang sampah, melakukan edukasi melalui media sosial.

Kata Kunci :Implementasi, Perda, Sampah

ABSTRACT

This research is based on the fact that in waste management in Cakeru Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency, the problem is the lack of information to the people of Cakeru Village regarding the importance of waste management, waste cleaning officers do not routinely collect and clean up waste, waste facilities are only available one type of trash can should be provided sorted trash cans. The purpose of this study is to determine the extent of the implementation of regional regulation number 16 of 2013 concerning waste management in Cakeru Village, North Amuntai District, inhibiting factors and what efforts are made. This study uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The technique of determining informants in this study uses purposive sampling so that there are 13 informants and data analysis techniques with data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show that the Implementation of Waste Management in Cakeru Village is not good. Namely: First, the communication variable is known in Cakeru Village, the transmission indicator is not good, the clarity indicator is not good and the

consistency indicator is not good. Second, the resource variable is known to be lacking in human resources/staff indicators, information indicators are lacking in authority indicators, and facilities indicators are lacking in facilities. Third, the disposition variable is known to be lacking in implementer attitudes and incentive indicators in Cakeru Village. Fourth, the bureaucratic structure variable is known to be lacking in SOP (standard operating procedures) and fragmentation indicators. Inhibiting factors include a lack of public awareness regarding waste disposal and a lack of outreach by the village to the community. Efforts have been made to create regulations prohibiting waste disposal and provide education through social media.

Keywords: *Implementation, Regional Regulation, Waste*

PENDAHULUAN

Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, yang berasal dari 202 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, jumlah timbunan sampah nasional mencapai 21,1 juta ton. Meskipun telah terjadi penurunan dalam jumlah sampah, permasalahan sampah tetap menjadi isu penting karena kompleksitasnya yang meningkat dan dampaknya yang bersifat lokal, nasional, maupun global.

Dalam menyelesaikan persoalan ini, diperlukan intervensi aktif dari pemerintah. Peran pemerintah atau aparatur publik sangat krusial dalam proses perumusan kebijakan, karena kebijakan publik akan menentukan arah dan tindakan pemerintah dalam menanggapi masalah tersebut. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan apakah suatu persoalan layak untuk diatasi melalui kebijakan.

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu, dan dilaksanakan oleh individu maupun kelompok yang memiliki otoritas. Salah satu bentuk implementasi kebijakan di tingkat daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, juga terdapat Pokok Kebijakan Nomor 74 Tahun 2018 mengenai Strategi dan Kebijakan Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang mencakup: pengurangan timbunan sampah, pengelolaan yang terpadu dan menyeluruh, pemenuhan hak serta kewajiban masyarakat, serta pengaturan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya awal untuk mengatasi persoalan sampah dan menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan data tahun 2023, jumlah sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 63,41 ton per hari. Dengan jumlah penduduk yang padat di 26 desa yang berada di wilayah Kecamatan Amuntai Utara, diperkirakan volume sampah akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di kecamatan ini perlu

mendapatkan perhatian serius, karena jika tidak dikelola dengan baik, potensi terjadinya kerusakan lingkungan serta bencana lainnya akan semakin besar. Sampah juga berisiko menjadi sumber penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Penumpukan sampah akan mencemari lingkungan, sementara pembuangan sampah secara sembarangan ke saluran air atau sungai dapat menyebabkan penyumbatan serta mencemari sumber air. Tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengolahan sampah menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan yang bertujuan mengubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil, tidak mencemari lingkungan, serta mengurangi jumlah sampah yang perlu dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kecamatan Amuntai Utara sendiri terdiri dari 26 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 21.788 jiwa, di mana Desa Cakeru memiliki populasi sebanyak 827 jiwa. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan secara optimal. Implementasi kebijakan menjadi tahapan krusial dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Tanpa pelaksanaan yang efektif, kebijakan publik tidak akan memberikan dampak yang nyata. Implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Permasalahan yang ada pada Desa Cakeru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat Desa Cakeru mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang pentingnya pengelolaan sampah karena masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan di lingkungan masyarakat, dan ada juga masyarakat membuang sampah ke sungai. (Sumber : Hasil Observasi Peneliti)
2. Petugas kebersihan sampah di Desa Cakeru tidak rutin mengangkut dan membersihkan sampah menyebabkan sampah menjadi menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak enak di lingkungan masyarakat. (Sumber : Hasil Observasi Peneliti)
3. Sarana tempat sampah masih belum memadai karena hanya tersedia satu jenis tong sampah, padahal seharusnya disediakan tempat sampah terpilah berdasarkan jenis, seperti sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, guna mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik. (Sumber : Data Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa Cakeru)

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Cakeru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

METODE

Dalam peneliti ini penulis menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *Purposive Sampling* yang informan sebanyak 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis melalui cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pokok pembahasan dalam penelitian ini, uraian selengkapnya disajikan dalam bagian berikut.

1. Komunikasi

a. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa transmisinya kurang baik. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya media transmisi atau penyebaran informasi mengenai peraturan tersebut. Banyak pihak yang menjadi sasaran kebijakan masih belum memahami atau bahkan mengetahui keberadaan peraturan daerah ini. Kurangnya sosialisasi menjadi kendala utama dalam pencapaian tujuan pengelolaan sampah yang diatur dalam regulasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai transmisinya kurang baik seperti yang dikatakan oleh pihak desa bahwa media penghubung atau transmisi kebijakan ini lewat himbauan secara langsung namun sampai saat ini masih belum adanya penyampaian informasi mengenai peraturan pengelolaan sampah sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tau tentang peraturan ini.

Berdasarkan hasil dokumentasi dapat disimpulkan bahwa mengenai transmisinya kurang baik karena berdasarkan dokumentasi lapangan area publik seperti kantor desa atau papan informasi tidak terdapat baliho atau poster yang memuat isi peraturan-peraturan larangan membuang sampah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa transmisi informasi terkait pengelolaan sampah tidak terlaksana dengan baik melalui media fisik di ruang publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa mengenai transmisi masih kurang baik karena pada desa Cakeru tersebut juga belum ada penyebaran informasi seperti terpasangnya baliho atau spanduk-spanduk yang dalam tanda kutip larangan buang sampah sembarangan atau ke sungai.

b. Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai kejelasan masih kurang jelas, karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami tentang kebijakan ini.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai kejelasan masih kurang jelas, karena sasaran dalam kebijakan ini (masyarakat) tidak tahu tentang adanya peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil dokumentasi dapat disimpulkan bahwa mengenai kejelasan masih kurang jelas, karena masyarakat tidak pernah diberikan penjelasan mengenai peraturan yang ada oleh pihak pengelola, hal ini dapat dilihat pada sosialisasi yang pernah ada di desa cakeru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Cakeru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai kejelasan masih kurang jelas karena sasaran dalam kebijakan ini (masyarakat) tidak memahami tentang Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

c. Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai konsisten masih kurang baik karena pelaksanaan pengangkutan sampah belum rutin, koordinasi antar instansi kurang optimal, dan penyampaian informasi kepada masyarakat tidak merata.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai konsisten dinilai masih *kurang baik* karena pelaksanaan pengelolaan sampah tidak berjalan konsisten, terlihat dari jadwal pengangkutan yang tidak teratur dan masih adanya penumpukan sampah di beberapa titik.

Berdasarkan hasil dokumentasi dapat disimpulkan bahwa mengenai konsisten dinilai masih *kurang baik* karena mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tidak pernah disosialisasikan dan juga petugas tidak rutin mengangkut serta membersihkan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa konsisten dinilai *kurang baik* karena pengangkutan sampah belum rutin, koordinasi antar instansi lemah, dan informasi kepada masyarakat belum disampaikan secara merata.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai sumber daya manusia kurang baik karena jumlah petugas terbatas, kurang pelatihan, dan minim sosialisasi.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai sumber daya manusia kurang baik karena Terlihat masih ada penumpukan sampah dan ketidakteraturan pengangkutan, menandakan kekurangan tenaga dan koordinasi.

Berdasarkan hasil dokumentasi dapat disimpulkan bahwa mengenai sumber daya manusia kurang baik karena peraturan daerah nomor 16 tahun 2013 pada BAB III dan BAB VI pasal II yang artinya setiap masyarakat diharuskan untuk ikut serta berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Dapat disimpulkan bahwa pada Desa Cakeru hal ini belum sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa mengenai sumber daya manusia kurang baik karena jumlah dan kompetensi petugas belum memadai, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

b. Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai informasi kurang baik karena nformasi tentang pengelolaan sampah belum disampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga banyak yang belum paham dan sadar pentingnya menjaga kebersihan.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai informasi kurang baik karena Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang pengelolaan sampah di lapangan masih kurang, sehingga masyarakat belum banyak yang terlibat dan peduli.

Berdasarkan hasil Dokumentasi dapat disimpulkan bahwa mengenai informasi kurang baik karena masyarakat tidak pernah diberikan penjelasan mengenai peraturan larangan membuang sampah oleh dari pihak pengelola.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi mengenai informasi kurang baik karena Penyampaian informasi masih terbatas dan tidak merata, sosialisasi kurang rutin, dan komunikasi dengan masyarakat belum efektif. Akibatnya, banyak warga yang belum paham dan pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik.

c. Wewenang

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai wewenang kurang baik karena, Wewenang belum jelas dan belum disampaikan dengan baik kepada

petugas dan masyarakat, sehingga banyak yang bingung tentang siapa yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai wewenang kurang baik karena, Pelaksanaan tugas dan pengawasan masih kurang teratur karena koordinasi antar pihak belum baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai wewenang kurang baik karena, Secara keseluruhan, wewenang kurang jelas dan kurang disosialisasikan, menyebabkan masyarakat dan petugas kurang paham dan aturan sulit ditegakkan dengan efektif.

d. Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai fasilitas masih kurang baik karena fasilitas pengelolaan sampah yang ada saat ini masih kurang memadai. Tempat sampah yang tersedia sedikit dan kecil, alat angkut seperti tosa kurang efektif, dan belum ada pemilahan sampah. Hal ini membuat pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai fasilitas masih kurang baik karena tempat sampah yang ada jumlahnya terbatas dan tidak teratur, banyak sampah menumpuk karena fasilitas kurang memadai. Alat pengangkut sampah yang digunakan juga tidak optimal, sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan lancar.

Berdasarkan hasil dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kurang baik karena tidak tersedianya tong sampah terpilah sampah yang ada hanya satu jenis tong sampah, tidak ada bank sampah dan mobil pengangkut hanya ada togas sebagai alat pengangkut sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa mengenai fasilitas masih kurang baik karena secara keseluruhan, fasilitas pengelolaan sampah di lapangan kurang lengkap dan kurang terawat. Kurangnya tempat sampah, alat angkut yang terbatas, dan tidak adanya pemilahan sampah membuat pengelolaan sampah kurang efektif. Kondisi ini menyebabkan lingkungan menjadi kurang bersih dan tidak nyaman bagi masyarakat. Perlu peningkatan fasilitas agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

3. Disposisi

a. Sikap Para Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai sikap para pelaksana masih kurang baik karena masih banyak masyarakat dan petugas yang tidak peduli terhadap aturan pengelolaan sampah, seperti masih membuang sampah

sembarangan dan tidak memilah sampah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran, pemahaman, dan sosialisasi dari pihak berwenang.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai sikap para pelaksana masih kurang baik karena di lapangan terlihat masih banyak tumpukan sampah, tempat sampah yang tidak digunakan dengan benar, dan lingkungan yang kotor, yang menunjukkan bahwa aturan dan kebijakan belum dijalankan dengan disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai sikap para pelaksana mengenai sikap para pelaksana masih kurang baik karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaksana dalam menjaga kebersihan dan mematuhi aturan, serta minimnya edukasi dan pengawasan dari pihak pemerintah desa maupun instansi terkait.

b. Insentif

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan insentif kurang baik karena insentif bagi petugas kebersihan dan masyarakat belum diberikan secara memadai. Hanya gaji pokok yang diterima petugas, tanpa tambahan penghargaan atau tunjangan lain. Hal ini membuat motivasi petugas rendah dan masyarakat kurang terdorong untuk ikut serta aktif dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan terkait insentif kurang baik karena Pengelolaan sampah berjalan tidak rutin dan kurang maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya insentif berdampak pada semangat kerja petugas yang rendah dan partisipasi masyarakat yang masih minim.

Berdasarkan hasil dokumentasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Cakeru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang baik karena terlalu minim gaji yang diberikan pemerintah desa ke petugas kebersihan sampah sehingga sampah lalai di angkut petugas mengingat gaji yang sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan Dokumentasi dapat disimpulkan Secara keseluruhan, insentif dalam pengelolaan sampah kurang baik karena belum ada sistem penghargaan yang jelas dan memadai untuk petugas maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan kinerja petugas kurang optimal dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan masih rendah. Keterbatasan anggaran dan regulasi menjadi kendala utama dalam pemberian insentif.

4. Struktur Birokrasi

a. SOPs

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai SOP kurang baik karena SOP pengelolaan sampah sebenarnya sudah dibuat dan ada pedomannya, tapi pelaksanaannya di lapangan belum konsisten. Banyak pihak merasa ada kendala seperti kurang koordinasi dan kurangnya sosialisasi sehingga SOP belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai SOP kurang baik karena pengangkutan sampah sering tidak rutin dan tidak terjadwal dengan baik. Sampah menumpuk di beberapa tempat karena pelaksanaan SOP kurang disiplin dan fasilitas pendukung kurang memadai, seperti kondisi jalan yang sulit dilalui.

Berdasarkan hasil dokumentasi dari Standar Operating Prosedures Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Cakeru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang baik tidak ada sosialisasi terkait SOP, baik kepada petugas maupun masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memahami aturan atau prosedur pengelolaan sampah yang seharusnya dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan SOP kurang baik karena secara keseluruhan, SOP pengelolaan sampah kurang baik karena pelaksanaannya belum konsisten, koordinasi antar pihak kurang, pengawasan dan sosialisasi minim, serta ada kendala teknis di lapangan yang menghambat efektivitas SOP.

b. Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kurang baik karena koordinasi dan pembagian tugas antar instansi dan pihak terkait dalam pengelolaan sampah masih belum jelas dan kurang teratur. Banyak pihak yang belum aktif mengawasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan sampah kurang efektif.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab masih kurang baik karena Pengawasan di lapangan kurang maksimal, himbauan kepada masyarakat jarang ditemukan, dan pelaksanaan pengelolaan sampah terlihat terpisah-pisah tanpa kerja sama yang baik antar instansi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kurang baik karena fragmentasi pengelolaan sampah terjadi karena koordinasi antar pihak belum berjalan baik,

pembagian tugas tidak jelas, dan kurangnya sosialisasi serta pengawasan membuat pengelolaan sampah tidak berjalan secara menyeluruh dan efektif. Akibatnya, pengelolaan sampah menjadi tidak terintegrasi dan berdampak pada kebersihan lingkungan yang kurang terjaga.

Faktor Yang Menghambat

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah

Faktor penghambat pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat itu sendiri.

2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa kepada masyarakat

Faktor penghambat kedua adalah kurangnya sosialisasi karena mungkin masih minimnya dana untuk melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat masih kurang paham maupun belum bisa menerapkan peraturan / kebijakan dengan baik dan benar.

Upaya Yang Telah Dilakukan

1. Membuat Peraturan Larangan Membuang Sampah

Untuk mengatasi pengelolaan sampah masih kurang baik karena kesadaran masyarakat rendah, fasilitas terbatas, dan aturan tidak ditegakkan dengan optimal. dibutuhkan fasilitas memadai, dan pengawasan yang lebih tegas.

2. Melakukan Edukasi Melalui Media Sosial

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa terhadap masyarakat maka perlu dilakukan edukasi salah satunya melalui media sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan dinyatakan kurang baik, dengan beberapa indikator seperti berikut : Transmisi; kurang baik karena disebabkan oleh kurang efektifnya media transmisi atau penyebaran informasi mengenai peraturan tersebut. Banyak pihak yang menjadi sasaran kebijakan masih belum memahami atau bahkan mengetahui keberadaan peraturan daerah ini. Kurangnya sosialisasi menjadi kendala utama dalam pencapaian tujuan pengelolaan sampah yang diatur dalam regulasi tersebut. Kejelasan; kurang baik karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami tentang kebijakan ini. Konsisten; kurang baik karena pelaksanaan pengangkutan sampah belum rutin, koordinasi antar instansi kurang optimal, dan penyampaian informasi kepada masyarakat tidak merata. Sumber Daya Manusia; kurang baik karena jumlah petugas terbatas, kurang pelatihan, dan minim sosialisasi. Informasi; kurang baik karena informasi tentang pengelolaan sampah belum disampaikan

dengan baik kepada masyarakat, sehingga banyak yang belum paham dan sadar pentingnya menjaga kebersihan. Wewenang; kurang baik karena wewenang belum jelas dan belum disampaikan dengan baik kepada petugas dan masyarakat, sehingga banyak yang bingung tentang siapa yang bertanggung jawab. Fasilitas; masih kurang baik karena fasilitas pengelolaan sampah yang ada saat ini masih kurang memadai. Tempat sampah yang tersedia sedikit dan kecil, alat angkut seperti tong sampah kurang efektif, dan belum ada pemilahan sampah. Hal ini membuat pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik. Sikap Para Pelaksana; kurang baik karena masih banyak masyarakat dan petugas yang tidak peduli terhadap aturan pengelolaan sampah, seperti masih membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran, pemahaman, dan sosialisasi dari pihak berwenang. Insentif; kurang baik karena insentif bagi petugas kebersihan dan masyarakat belum diberikan secara memadai. Hanya gaji pokok yang diterima petugas, tanpa tambahan penghargaan atau tunjangan lain. Hal ini membuat motivasi petugas rendah dan masyarakat kurang terdorong untuk ikut serta aktif dalam pengelolaan sampah. Standar Operating Procedures; kurang baik karena standar operating procedures pengelolaan sampah sebenarnya sudah dibuat dan ada pedomannya, tapi pelaksanaannya di lapangan belum konsisten. Banyak pihak merasa ada kendala seperti kurang koordinasi dan kurangnya sosialisasi sehingga standar operating procedures belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Fragmentasi; kurang baik karena koordinasi dan pembagian tugas antar instansi dan pihak terkait dalam pengelolaan sampah masih belum jelas dan kurang teratur. Banyak pihak yang belum aktif mengawasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan sampah kurang efektif. Faktor yang menghambat: kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan memilih untuk membuang sampahnya ke sungai dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang tidak mengelola sampah dengan baik. pengetahuan menjadi kunci dalam mengelola sampah dengan baik, kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat sendiri masih ada yang belum bisa menerapkan peraturan maupun kebijakan dengan baik. Upaya Yang Telah Dilakukan: Membuat Peraturan dan Penegakan Disiplin Masyarakat dalam Membuang Sampah, Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan. aturan yang harus dipatuhi masyarakat, dilarang membuang sampah sembarangan di tempat umum seperti jalan, sungai, atau taman. memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan penyampaian informasi secara cepat dan luas. pemerintah desa dapat menyebarkan pesan tentang larangan membuang sampah dan sanksi bagi pelanggar dengan lebih efisien.



DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Chotimah, C. (2020) *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Pantai Selatan Tulungagung*. Tulungagung: Akademi Pustaka

Sugiyono, 2021. *Metode penelitian administrasi* (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D (edisi revisi). Bandung Alfabeta

Hastuti, B.D., Anwar, F. and Titi, T.D. (2021) „Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan“, *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), pp. 92–101